

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM ERUPSI GUNUNG SINABUNG
KABUPATEN KARO SUMATERA UTARA TAHUN 2013 – 2015**

Oleh :

Renny Febrin

Email : rennyfebrin09@gmail.com

Supervisor : Dra. Hj Wan Asrida, M.Si

Library of Riau University

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl H.R. Soebrantas Km 12,5 simp Baru Pekanbaru

Tlp/Fax 0761-63227

Abstract

This research was motivated by the concern of Mount Sinabung eruption that has been happened since 2013. Many parties have to synergize and coordinate well to involve in this disaster management by giving services to the refugees that are scattered in several evacuation posts. The purpose of this research is to determine the role of Karo District Government in settling the Mount Sinabung eruption and the factors that obstruct and support the settlement of this disaster. The method used is descriptive and qualitative method which can be defined as the process of solving problems by describing the situations of the subject and object of the research based on the current facts. The theory used in this research include Government Management, Government Coordination and Disaster Management.

Based on the result we can conclude the role of each departement are related, among Disaster Management Agency (BPBD) Karo tasked as the overall coordination of the disaster management process, the Office of Social Affairs is responsible for the fulfillment the logistics of refugees, the Public Works Departement is responsible for the evacuation process, fulfill the needs of clean water for bathing, washing, toilet, and handling the post evacuation, the Departement of Health is responsible for guranteeing public health of refugees and provide aid to refugees who are sick. Each relevant department has been manage the refugees of Mount Sinabung eruption as much as possible even though there are still some lacks of coordination. However, there are no obstacles in funding the refugees' needs to fulfill their decent life.

Keywords : Role of Government, Coordination, Disaster Managemen

PENDAHULUAN

Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera - Jawa - Nusa Tenggara - Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa.

Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia.¹

Indonesia juga terletak pada titik pertemuan tiga lempeng tektonik (*tectonic plate*) yang saling bertabrakan, yaitu lempeng Eurasia, Lempeng Indo Australia dan Lempeng Pasifik, kondisi ini membuat Negara Indonesia menjadi rangkaian gunung api aktif (rangkaiannya Gunung Api Indonesia). Jumlah gunung api aktif di Indonesia sekitar 140.²

Pada tahun 2015 ini ada beberapa gunung api yang aktif kembali di Indonesia, diantaranya adalah Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara berstatus Awam (level 4), Gunung Bromo di Jawa Timur berstatus Siaga (level 3), dan Gunung Gamalama di Pulau Ternate, Maluku Utara. Diantara gunung api yang

sedang aktif di Indonesia saat ini, Gunung Sinabung merupakan yang paling banyak menjadi pembicaraan di Indonesia bahkan dunia karena erupsinya yang terus berulang-ulang dan belum berhenti dari tahun 2010 sampai 2015 ini.

Gunung yang memiliki ketinggian 2.460 meter ini tidak pernah tercatat meletus sejak tahun 1600, tetapi mendadak aktif kembali dengan meletus pada tahun 2010 yang hanya beberapa kali erupsi dan berhenti, lalu kembali meletus pada September 2013 dan berlangsung terus sampai 2015 ini.

Erupsi yang terus menerus ini memaksa masyarakat yang tinggal di sekitar lereng Gunung Sinabung untuk mengungsi, sampai 22 Oktober 2015 masih ada 2615 Kepala Keluarga dengan jumlah 9523 jiwa yang tersebar di 9 posko pengungsian. Kondisi ini tentunya membutuhkan perhatian dan peran pemerintah, bukan hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah dan jajarannya, hal ini sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam pasal 5 berbunyi "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana".

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 tahapan, yaitu pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana³. Dalam penelitian ini penulis meneliti pada tahapan saat tanggap darurat dari tahun 2013 yang masih berlangsung sampai saat ini. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat

¹ Bnpb.go.id

² *ibid*

³ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah, Pasal 28.

meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya; penentuan status keadaan darurat; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera sarana – sarana vital⁴.

Dalam penelitian ini peneliti membuat beberapa identifikasi masalah, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi lintas sektor beberapa dinas terkait yang masih tidak jelas dalam penanganan pengungsi bencana erupsi Gunung Sinabung diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo, Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana erupsi Gunung Sinabung, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum, antara lain pada hal pendistribusian pendanaan yang memperlambat proses penanggulangan bencana karena dana yang tersekat-sekat.
2. Pengelolaan posko pengungsian oleh tiap koordinator posko dan penanggungjawab posko antara lain pemenuhan kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan), penyediaan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) dan

air bersih, transportasi bagi anak-anak pengungsian ke sekolah, dan kendaraan untuk evakuasi

3. Penanganan yang belum efektif dari pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Sinabung tetapi masih pada zona yang tidak harus mengungsi, misalnya masalah lahan pertanian yang rusak akibat terkena material vulkanik gunung sinabung

Menurut Solway (2004)⁵, Tujuan pemerintah daerah dalam pengelolaan bencana meliputi hal-hal berikut ini :

- a. Mengidentifikasi orang dan wilayah yang rentan bencana dalam lingkup kabupaten.
- b. Memastikan bahwa semua anggota masyarakat menyadari potensi dampak bencana alam.
- c. Membagikan saran dan panduan praktik yang baik kepada masyarakat untuk mitigasi bencana.
- d. Menjaga hubungan dengan para pejabat yang bertanggung jawab dalam perencanaan, kesehatan, dan kesejahteraan dengan mengeluarkan peringatan atau sistem pengendalian massa dan kebakaran.
- e. Memastikan bahwa anggota masyarakat menerima pelatihan first aid atau pertolongan pertama yang sesuai.

⁴ *ibid.*, Pasal 39

⁵ *ibid.*, hal. 61

- f. Melaksanakan program pendidikan dan penyadaran masyarakat melalui kegiatan yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah setempat.
- g. Mengidentifikasi rute evakuasi dan lokasi tempat yang aman serta lokasi pengungsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. yang dapat diartikan sebagai suatu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek penelitian yang berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Beberapa metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah wawancara yaitu menggunakan daftar pertanyaan untuk narasumber dan dokumentasi yaitu peneliti menggunakan informasi atau dokumen yang sudah tersedia.

Setelah data dan bahan terkumpul, kemudian peneliti mengolah data tersebut berdasarkan gambaran secara rinci kenyataan yang ditemukan di lapangan dan wawancara. Kemudian setelah data terkumpul penulis mengelompokkan data sesuai dengan jenis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Kabupaten Karo dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung

Penetapan Status Tanggap Darurat

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

melakukan pengamatan visual dan instrumental, apabila menunjukkan trend peningkatan serta potensi ancaman bahaya Gunung Sinabung maka akan dikeluarkan Surat Kepala Badan Geologi yang berisi hasil pengamatan dan juga rekomendasi wilayah yang harus segera dievakuasi. Surat Kepala Badan Geologi menjadi dasar bagi Bupati Kabupaten Karo untuk mengeluarkan Keputusan Bupati tentang penetapan dan perpanjangan status tanggap darurat. Saat status tanggap darurat posisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo menjadi barisan paling awal untuk mengkoordinir pihak-pihak terkait di jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo untuk persiapan evakuasi masyarakat korban bencana.

Evakuasi Masyarakat Korban Bencana

Setelah ditetapkan status tanggap darurat bencana maka Badan Penanggulangan Bencana bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, untuk evakuasi masyarakat korban bencana keluar dari desa mereka yang berada di zona berbahaya. Evakuasi warga melibatkan semua instansi pemerintah bergabung untuk mengevakuasi warga yang masih bertahan dalam radius 3 kilometer dari Gunung Sinabung, tim gabungan tersebut terdiri atas BPBD, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan, jumlahnya mencapai 170 personel. Dalam upaya evakuasi, tim menggunakan kendaraan operasional, yakni tujuh truk, dua *hagglund* Brimob, empat ambulans, dan sepuluh kendaraan Basarnas dan BNPB untuk menunjang proses evakuasi. Selain itu tim

gabungan mendirikan posko taktis di radius 5 kilometer, tepatnya di Desa Gurukinayan. Posko tersebut untuk tempat bersiaga tim evakuasi.

Pengelolaan Posko Pengungsian

Bencana erupsi Gunung Sinabung merupakan bencana besar yang berdampak terhadap banyak orang, dalam penanggulangan bencana ini BPBD kabupaten lah yang berada pada barisan terdepan karena mereka merupakan instansi yang khusus menangani bencana, sedangkan Dinas Sosial berada dibelakang BPBD untuk menjadi *back up*.

Penanganan pengungsi di posko pengungsian juga melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, yang paling utama adalah penyediaan air bersih beserta fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus). Dinas Pekerjaan Umum dalam perannya pada penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung terlihat sudah baik, dengan adanya inovasi seperti yang awalnya air bersih diantar ke posko pengungsian sekarang sebagian posko sudah dibuatkan sumur bor, sehingga air bersih selalu tersedia di posko pengungsian. Air yang dari sumur bor tentunya kebersihannya lebih terjamin dibandingkan saat diantar dengan mobil tangki karena harus melalui proses pemindahan dari tangki ke penampungan air di posko.

Dalam hal menjamin kebersihan air tersebut Dinas Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, saat sampai di posko pengungsian Dinas Kesehatan bertugas memastikan adanya kebersihan sanitasi dan pemeriksaan lingkungan diantaranya

air dan udara, Selain pemeriksaan kualitas udara dan air di posko pengungsian, dinas kesehatan juga rutin mengadakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan kepada masyarakat pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung

Faktor-Faktor Penghambat dalam Penanggulangan Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung

Kekurangan Sumber Daya Manusia pada Badan Penanggulangan Bencana

Faktor penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo dalam penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung ini salah satunya karena kekurangan Sumber Daya Manusia dari aspek kualitas maupun kuantitas masih perlu pembenahan untuk mendapatkan hasil kinerja yang optimal dalam memberikan pelayanan hal ini di karenakan BPBD Kabupaten Karo baru dibentuk tahun 2014, sehingga BPBD harus bekerja sambil belajar juga. Masalah pelatihan untuk para pegawai di BPBD Kabupaten Karo sudah pernah mengikuti pelatihan yang memberikan penjelasan tentang bagaimana cara-cara menanggulangi bencana dan tanggap darurat bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo memang baru dibentuk tahun 2014 di dalam keadaan tanggap darurat erupsi Gunung Sinabung, sehingga mereka tetap harus belajar sambil bekerja untuk melakukan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. BPBD Karo harus melaksanakan tugas mereka dengan semaksimal mungkin

walaupun ada kekurangan karena pada dasarnya tugas BPBD menyangkut kelangsungan hidup masyarakat korban bencana yang harus dipertimbangkan sisi kemanusiaannya.

Koordinasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo yang Kurang Baik dan Terarah

Dinas-dinas yang terkait dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung ini berada dibawah komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam pengkoordinasian antar instansi pun banyak hal yang menghambat penanggulangan bencana, salah satunya adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Karo. Penghambat utama bagi Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung adalah karena kurang baiknya koordinasi sehingga terjadi “menunggu” perintah dan koordinasi dari BPBD karena Dinas Sosial hanya sebagai pendukung.

Dinas Sosial seperti menunggu arahan dari BPBD Kabupaten Karo. BPBD Kabupaten Karo yang baru terbentuk belum sepenuhnya baik dalam proses mengarahkan dinas terkait untuk pelaksanaan penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung yang tergolong kedalam bencana besar.

Standar Operasional Prosedur Belum Jelas

Miskomunikasi yang sering terjadi antar pihak terkait dikarenakan dana yang sudah diusulkan tidak langsung turun ke

dinas-dinas terkait tetapi melalui BPBD, hal ini lah yang menyebabkan penanganan menjadi lamban, contohnya BPBD juga mengeluarkan dana untuk logistik sedangkan masalah logistik adalah tugas Dinas Sosial sehingga tidak seluruhnya laporan itu berasal dari Dinas Sosial. Sebaiknya saat dana yang sudah dianggarkan oleh dinas-dinas itu turun dari BNPB langsung diserahkan ke dinas-dinas terkait dan dikelola, lalu hasil pertanggungjawaban dilaporkan ke BPBD, untuk dilaporkan kembali ke BNPB sebagai pemberi dana. SOP (Standar Operasional Prosedur) di BPBD Kabupaten Karo ini belum terlaksana, masih dalam proses

Pada mekanisme pendanaan dalam penanggulangan bencana, dinas-dinas terkait menyusun rencana dengan mendaftarkan apa saja yang mereka butuhkan untuk penanganan bencana tersebut beserta anggaran dananya, lalu dinas itu melaporkan kepada BPBD untuk dirangkum lalu diserahkan kepada BNPB agar dapat menurunkan dana. Dana yang turun dari BNPB diserahkan kepada dinas-dinas terkait melalui BPBD, dalam hal ini terlihat bahwa BPBD Kabupaten Karo lamban dalam hal pendistribusian dana ke dinas-dinas terkait, khususnya pada Dinas Sosial sudah terjadi kebingungan dalam pengadaan logistik.

Persediaan Obat-obatan yang Kurang Saat Keadaan Darurat

Salah satu hal yang menjadi penghambat bagi Dinas Kesehatan dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung ini biasanya dikarenakan situasi di lapangan yang tidak normal dan bisa berubah

sewaktu-waktu, contohnya saat terjadi erupsi Dinas Kesehatan kekurangan obat tetes mata dan masker karena itu juga yang paling cepat habis dalam keadaan normal maupun erupsi. Terlihat bahwa kesiapsiagaan dan stok obat-obatan seharusnya dapat terpenuhi untuk mengatasi kondisi darurat yang bisa terjadi kapan saja, sehingga tidak harus terjadi kekurangan.

Pengungsi yang Sering Meninggalkan Posko Pengungsian

Masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Sinabung mayoritas berprofesi sebagai petani, sehingga mereka tidak terbiasa jika hanya berdiam diri di posko pengungsian dan lebih memilih untuk bekerja di ladang orang lain atau menyewa ladang sekedar untuk mendapatkan uang tambahan. Ketidakhadiran sebagian pengungsi di lokasi pengungsian juga menjadi masalah untuk BPBD, ada penungsi yang meninggalkan posko pengungsian tapi nama mereka tidak dikeluarkan dari daftar pengungsi, dan setiap ada kebijakan baru mereka tetap mendapatkannya. Sekarang mekanismenya penyaluran logistik sesuai permintaan dari posko (koordinator posko) agar bantuan yang dikirim tidak mubajir, menurut penulis memang sudah sepantasnya mereka tetap mendapatkan bantuan saat ada kebijakan baru. Karena bagaimanapun mereka sudah banyak kehilangan harta benda nya dalam bencana ini.

Pergi meninggalkan posko pengungsian juga digunakan oleh pengungsi untuk kembali ke desa mereka, ada pengungsi yang kembali ke desa nya untuk melihat keadaan rumah ataupun mengambil barang

yang masih tertinggal saat mereka meninggalkan desa untuk mengungsi. Terkadang masyarakat yang tinggal di daerah zona merah juga nekat keluar masuk desa mereka

Faktor-Faktor Pendukung dalam Penanggulangan Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung

Kerja Sama yang Baik Antar Pihak Terkait

Bencana erupsi Gunung Sinabung yang sudah berlangsung selama tiga tahun tentunya membutuhkan penanganan yang serius dari seluruh dinas yang terkait. Penanganan bisa berjalan dengan kerja sama semua pihak yang terkait.

Tugas BPBD sebagai badan yang khusus menangani kebencanaan tentunya tidak dapat terlaksana apabila tanpa bantuan dan kerja sama dengan pihak-pihak lain, selama ini terus dijalin kerja sama yang baik. Kerjasama dengan berbagai pihak ini lah yang mendukung dalam penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung ini. Selain dinas-dinas terkait juga didapatkan bantuan dari pihak-pihak ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemanusiaan, Palang Merah Indonesia, Pramuka, Sukarelawan dan juga penyumbang dari individu maupun perusahaan.

Dana yang Cukup

Pemerintah Kabupaten Karo juga bisa melaksanakan penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung ini oleh pendanaan yang cukup. Sejauh ini pendanaan yang memadai menjadi pendukung bagi Pemerintah dalam menanggulangi bencana erupsi Gunung Sinabung ini, setiap kebutuhan dana yang diajukan oleh

dinas-dinas terkait masih dapat terpenuhi. Pendanaan merupakan suatu aspek yang penting dalam penanganan bencana, karena dengan dana yang cukup dapat memenuhi semua kebutuhan untuk operasional bencana dan kebutuhan korban bencana di pengungsian.

Tenaga Medis yang Cukup

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana selalu dibutuhkan tenaga pelaksana, diantaranya adalah tenaga medis untuk menjamin kesehatan masyarakat korban bencana di pengungsian. Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Kesehatan cukup memadai, tenaga kesehatan hampir 1000 orang, Dinas Kesehatan Kabupaten Karo juga didukung Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Kesehatan baik teknis, obat-obatan, maupun peralatan. Palang Merah Indonesia juga sering mengadakan pengobatan massal keliling. Dinas kesehatan hanya menangani pelayanan kesehatan dasar, PMI terkadang membawa dokter spesialis, itu sangat membantu untuk para pengungsi.

Adanya Buffer Stock pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Pemenuhan kebutuhan pengungsi khususnya logistik ditangani oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, sejauh ini yang membantu mereka dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung ini adalah adanya buffer stock pada Kementerian Sosial yang dapat dipergunakan dalam keadaan darurat, jadi Buffer stock yang ada di Kementerian Sosial bisa sebagai penyisipan Bantuan. Contohnya saat ada Kesalahan data

dalam jumlah pendataan jumlah pengungsi maka dapat dipergunakan *buffer stock* yang ada di Kementerian Sosial pada Dinas Sosial Sumatera Utara berupa kebutuhan bahan makanan (beras, kecap, ikan kalengan, dan minyak goreng), sandang (kain sarung dan kain panjang), perlengkapan tidur (selimut dan tikar), peralatan evakuasi (tenda biru/gulung, tenda peleton, dan tenda regu), dapur umum ada 2 unit dan personil penanggulangan bencana (Tagana) sebanyak 100 orang.

Bantuan dari Pihak Ketiga yang Memadai

Bantuan dari pihak ketiga antara lain Palang Merah Indonesia, Pramuka, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemanusiaan, Sukarelawan dan juga penyumbang dari individu maupun perusahaan.

Bantuan yang telah didistribusikan oleh Palang Merah Indonesia sejak 15 September 2013 hingga Juni 2015 meliputi masker 206.300 buah, selimut 1.140 helai, obat-obatan 588 kotak, kipas tangan 6.000 buah, sarung 2.590 helai, seng 6.500 lembar, kantong mayat 100 buah, tong air 28 buah, beras 215 karung, kelambu 290 buah, baby kit 100 buah, sayuran 9.300 kg, air mineral 2.000 kotak, terpaulin 200 lembar, tikar 250 lembar, dan hygen kit 250 kotak.

Posko PMI di Kabanjahe juga sudah mendistribusikan air bersih untuk bencana erupsi Gunung Sinabung dari tanggal 22 September 2014 hingga 22 September 2015 sebanyak 6.291.500 liter ke 67 posko pengungsian yang tersebar di Kabupaten Karo.

KESIMPULAN

Posisi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo menjadi barisan paling awal untuk mengkoordinir proses evakuasi terhadap masyarakat yang wilayahnya terdampak erupsi gunung karena memang BPBD Kabupaten yang lebih tau kondisi masyarakat di wilayahnya. BPBD tentunya tidak bertindak sendiri, saat ada bencana yang sudah terdampak terhadap masyarakat luas dan dalam status tanggap darurat, BPBD berhak membentuk Satuan Tugas Penanganan Bencana, pada kasus ini dibentuk Satuan Tugas Penanganan Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Sinabung.

Pada penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung ini BPBD kabupaten lah yang berada pada barisan terdepan karena mereka merupakan instansi yang khusus menangani bencana, sedangkan Dinas Sosial berada dibelakang BPBD untuk menjadi *back up* khususnya dalam hal penanganan logistik pengungsi. Penanganan pengungsi di posko pengungsian juga melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, yang paling utama adalah penyediaan air bersih beserta fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus)

Dinas Kesehatan berperan dalam pemeriksaan kualitas udara dan air di posko pengungsian, dinas kesehatan juga rutin mengadakan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan kepada masyarakat pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung. Dalam pelaksanaan tugasnya ini Dinas Kesehatan dibantu oleh Palang Merah Indonesia.

Faktor penghambat bagi pemerintah Kabupaten Karo dalam penanggulangan bencana ini sebagai berikut : 1) Belum jelasnya standar operasional yang ada di dinas terkait pada penanggulangan bencana alam. 2) Koordinasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo yang kurang baik dan terarah kepada dinas-dinas terkait. 3) Persediaan obat-obatan yang kurang pada saat terjadi keadaan darurat tiba-tiba. 4) Pengungsi yang sering meninggalkan posko pengungsian dalam jangka waktu yang cukup lama.

Faktor pendukung bagi pemerintah Kabupaten Karo dalam penanggulangan bencana erupsi Gunung Sinabung sebagai berikut : 1) Kerja sama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan dinas-dinas yang terkait dalam penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung. 2) Pendanaan yang cukup. 3) Adanya bantuan dari pihak ketiga contohnya Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemanusiaan, Palang Merah Indonesia, Pramuka, Sukarelawan dan juga penyumbang dari individu maupun perusahaan. 4) Tenaga Kesehatan yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Azizy, A Qodri. 2007. *Change Management dalam Reformasi Birokrasi*: Gramedia Pustaka Utama.

Arif, Mirrian Sjofyan dkk. 2010. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Ikrar Mandiriabadi.

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kusumasari, Bevaola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.

Sukandarrumidi. 2002. *Metodologi Penelitian. Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Syafiie, Inu Kencana. 1998. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Pertija.

Syahza, Almasdi. 2009. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.

Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Karo.

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karo.

Skripsi

Skripsi Edi Kurniawan/0901120057. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial Kabupaten Kampar dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu Tahun 2011.

Skripsi Rina Mariana/0901131835. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Banjir oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Siak di
Kecamatan Sungai Mandau
Tahun 2013.

Internet

www.bnpb.go.id

www.sumutprov.go.id

www.karokab.go.id

www.bpbd.sumutprov.go.id